



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pembahasan Tak Transparan

Anggaran Septic Tank Rawan Bancakan

JAKARTA - Pengelolaan kebijakan anggaran di Pemprov DKI mulai dikritisi sejumlah pihak. Sebab, sejumlah anggaran yang akan dibahas dan dijalankan pada 2020 cukup mengejutkan. Apalagi, proses pembahasan anggaran masih dinilai tertutup, sehingga rawan bancakan.

Direktur eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (Letra) Yenny Sucipto mengatakan, proses transparansi anggaran yang ada di Pemprov DKI mengalami kemunduran. Sebab, jauh sebelum DKI dipimpin Anies, proses pengadaan anggaran terbilang transparan. "Kalau dulu ada proses e-budjeting untuk memulai pembahasan anggaran, tapi kalau sekarang sudah tidak ada," ujar dia, Kamis (10/10/2019).

Padahal, kata Yenni, dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait sistem informasi keuangan daerah harus dilakukan secara transparan. Maka dari itu, bila itu tidak dijalankan maka bisa dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. "Karena tidak ada keterlibatan masyarakat sebagai pengawasnya," tegas dia.

Akibat tidak transparan, banyak sekali anggaran dengan nilai yang fantastis disodorkan oleh eksekutif untuk dibahas dalam RAPBD 2020 DKI. Karena, proses pembahasan anggarannya sendiri sudah tertutup, sehingga tidak ada peran pengawas ■

"Tiba-tiba saja anggarannya dinaikan seperti tim gubernur itu, dan sekarang juga untuk anggaran pembuatan septic tank," ungkap dia.

Menurut dia, eksekutif sempat memanfaatkan proses transisi anggota DPRD kala itu. Karena baru beberapa pekan anggota dewan selaku pemegang kebijakan dilantik. "Nah pada masa transisi itulah mereka memanfaatkan pembahasan anggaran tanpa melibatkan pihak lain, dan melahirkan kebijakan anggaran yang rawan menjadi bancakan," jelas dia.

Bahkan, Yenni mengaku, pihaknya sudah pernah protes ke Pemprov DKI atas hilangnya sistem e-budjeting. Namun,

sampai sekarang aspirasi itu tidak diindahkan, dan masih berjalan tanpa proses transparansi. "Kita sudah pernah teriak satu tahun lalu mempertanyakan proses e-budjeting yang hilang," imbuhnya.

Ke depan, sambung dia, Pemprov DKI harus memberlakukan lagi sistem pembahasan anggaran menggunakan e-budjeting, sesuai dengan amanat undang-undang. Minimal menyangkut anggaran dan realisasi hingga pelaporan. "Apalagi nilai RAPBD 2020 sudah mencapai Rp78 triliun. Maka kalau tidak dilakukan, bisa dikatakan Pemprov DKI tidak amanat," tandas dia.

Salah satu anggaran yang menuai sorotan publik yakni usulan Dinas Sumber Daya DKI Jakarta tengah terkait nggaran pembuatan septic tank atau sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) pada 2020. Nantinya, dari besaran anggaran itu akan ditempatkan di 30 titik di Jakarta.

Draf pembahasan pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, anggaran yang diajukan senilai Rp166,2 miliar. "Memang usulan itu dari kita, dan proses lelang kan nanti tahun depan," ungkap Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf.

Untuk pembangunan septic tank itu, dibangun jenis septic tank komunal. Pembangunan dikhususkan bagi masyarakat di permukiman dekat kali. Juani mengaku, totalnya ada 30 titik. "Nantinya akan ditempatkan di daerah yang kemarn buangnya langsung ke kali. Disitu kita buat itu (septic tank) komunal," tukas dia.

Warga Gunakan Drum Sampah
Di kawasan Tamansari, warga terpaksa bangun septic tank dengan drum sampah. Selain di Tanjung Duren Utara, masalah sanitasi juga ditemui di wilayah lain di wilayah Jakarta Barat. Salah satunya seperti yang terjadi di Gang Cengkeh Dalam, RT 7/7, Kelurahan Pinangisia, Tamansari, Jakarta Barat. Tepatnya berada di gang

sepanjang 200 meter dengan lebar jalan 1,5 meter yang lokasinya tidak jauh dari Kawasan Kota Tua Jakarta. Warga terpaksa membuat septic tank seadanya dengan menggunakan drum sampah. Septic tank tersebut ditanam di dalam rumah mereka dengan kedalaman 1,5 meter.

"Septic tanknya itu pakai drum sampah yang warna biru itu loh, terusnya ditanam di dalam rumah. Jadi warga di sini itu tidur di atas septic tank," ulas Ketua RT 07 RW 07 Pinangisia Subur.

Sehingga, di lokasi totalnya sebanyak 18 toilet yang ada dari puluhan rumah petak yang berderet di sepanjang gang tersebut.

Toilet di tempat itu juga terpisah dengan bangunan rumah. Tiap satu toilet digunakan oleh beberapa kepala keluarga (KK). "Di RT 07 ini total ada 300 jiwa dari 103 KK. Karena satu rumah ini kan bisa diisi sampai 2-3 KK," ulas dia.

Terpaut hal tersebut, Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menuturkan, untuk membenahi masalah ini tidak bisa parsial hanya fokus di septic tank komunal saja, tetapi sebagai berikut. Pertama, cek regulasi peruntukan kampung tersebut di dalam RTRW dan RDTR untuk apa, permukiman, RTH bantaran kali atau lainnya.

Kemudian, lanjut Nirwono, cek legalisasi sertifikat kepemilikan lahan warga, jika sesuai RTRW RDTR dan sertifikatnya sah maka penda wajib menata ulang kawasan/meremajakan/merevitalisasi kampung padat tersebut seperti hunian ditata ulang menjadi hunian vertikal (rusunami) rendah berlantai 4-6.

Selanjutnya, infrastruktur jalan (sebagai jalur evakuasi) dan saluran air dibenahi, listrik dan gas terpadu (mencegah kebakaran), membangun jalur instalasi pengolahan air limbah (termasuk septic tank komunal), serta menyediakan RTH taman lapang (sebagai tempat evakuasi).

Jika tidak sesuai peruntukan RTRW RDTR kampung tersebut harus direlokasi ke permukiman terdekat berupa rusunami terdekat dan lahan tersebut dikem-

balikan sesuai fungsi peruntukannya dalam RTRW RDTR sekaligus menata ulang kalinya.

Nirwono Joga menambahkan, untuk jangka pendek silakan tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah, untuk itu harus segera dilakukan langkah-langkah tersebut di atas sehingga tahun depan bisa tuntas menyelesaikan masalah tersebut dan juga kasus yang sama di kampung-kampung lainnya.

Nirwono Joga menambahkan, kemudian menyelesaikan masalah septic tank dan sanitasi tidak bisa secara parsial tetapi harus menyeluruh, "Dalam hal ini menata ulang kawasan permukiman tersebut tetapi yang sesuai RTRW RDTR-nya," tukasnya.

Salah satu warga, Titi menambahkan, terpaksa menanam septic tank dengan drum sampah karena terhalang biaya. "Ya mau gimana lagi, yang murah aja kita pikirkannya," keluh Siti.

Demikian, lantaran tidak sesuai standar, kini dia dan keluarga sudah tidak bisa Buang Air Besar (BAB) di toilet rumahnya karena kondisi septic tank yang telah penuh dan belum disodot.

"Sekarang saya kalau mau buang air ya harus ke WC umum di ujung jalan. Habisnya mau gimana lagi daripada bau karena sudah enggak mampu nampung lagi," tandas dia.

Selain masalah septic tank yang tidak layak, kondisi saluran air di Gang Cengkeh, RT 7/7, Kelurahan Pinangisia, Tamansari, Jakarta Barat, juga sangat buruk. Di mana saluran air yang berada di depan permukiman padat penduduk di gang ini hanya selebar 5 cm dengan kedalaman hanya 50 cm.

Kondisinya pun saat ini penuh dengan air mengendap dan sisa sampah rumah tangga. (dny/ibl)